

Daftar Pustaka

A. Buku / Literatur

Adjie, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.

———. “*Kendala Administrative Penal Law sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang.*” Paper, Jakarta, 2007.

Agustina, Shinta, Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, Ronni Saputra .
*Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP, 2016.

Ali, Mahrus. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Basuki Winarno, Nur. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang
Mediatama, 2006

Beirne, Piers, James Messerschmidt, dan Ermansjah Djaja. *Tipologi Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Cahyani Dwi, Tinuk . *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan
Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo, 2024
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Laila Kholis, Efi. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.

———. *Titik Singgung Menyalahgunakan Kewenangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana, 2023.

Nawawi Arief, Barda. *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenada Media , 2016

———. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002.

Sasanka, Haris. *Komentar Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius. *Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Sridjaja Pradjonggo, Tjandra. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Wahyu. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

B. Jurnal

Amrullah. M. Dani Fariz, Yuli Kasmarani, dan Dora Mustika, 2024 “Analisis Sifat Melawan Hukum Formil terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1, 57-68

Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, 2025 “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2, 11-24

Naibaho, Rinsofat dan Indra Jaya M. Hasibuan, 2021 “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 2, 203-214

Sari, Indah, 2020 “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,” Vol. 11, No. 1, 53-70

Sijabat, Very Pahala, Zico Ricardo Aritonang, Lenny Maria Aritonang dan Agatha Christie Tarigan.2024 “Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum”. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.7. 1-19

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Perbuatan
Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 1957 K/Pid.Sus/2014 tentang Tindak
Pidana Korupsi Dana APBD DPRD Kabupaten Pekalongan (H.M.
Syafrudin Huna).

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang.